**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai warga negara yang baik, maka kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan bagi anaknya dan seorang anak berhak meminta untuk diberikan pendidikan. Bahkan di dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan kalimat ”mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang secara tersirat mengisyaratkan setiap warga negara untuk bisa cerdas sehingga dapat membangun bangsa. Untuk membangun suatu bangsa, salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan.

Pengerucutan dari UUD 1945 khususnya pada dunia pendidikan pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB II tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan pasal 3 Sikdiknas (2003:2) yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 3 diatas bahwa pendidikan harus dilaksanakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kesempatan mengenyam bangku pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Masih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah bagian kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara pasal 5 ayat (1) Sikdiknas (2003:7) menyebutkan bahwa, ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa, “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, seyogyanya tidak ada perbedaan dalam kesempatan mengenyam pendidikan bagi semua warga negara Republik Indonesia dan juga tiada perbedaan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai macam program pendidikan yang dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional, salah satunya dengan cara mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Program wajib belajar yang dirilis pemerintah menurut peneliti jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dan (2) maka dapat menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi anak normal, akan tetapi juga kepada mereka yang mengalami kelainan, baik kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Hal tersebut ternyata ditegaskan pula dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada BAB VI tengan Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan bagian kesebelas tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pasal 32 ayat (1) Sikdiknas (2003:7) bahwa:

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ketetapan undang-undang tersebut semakin mempertegas bahwa Pendidikan Nasional Indonesia seharusnya diselenggarakan dengan sepenuhnya tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya bahkan kondisi kelainan apapun yang dialami oleh anak. Dalam dunia pendidikan, anak yang memiliki kondisi berkelainan disebut dengan anak berkebutuhan khusus dan sesuai dengan ketetapan undang-undang tersebut, anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam bangku pendidikan.

Kesempatan yang sama tersebut mengharuskan berbagai pihak membantu mewujudkannya, karena di era modern ini masih terdapat kepincangan dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, guru sebagai tenaga pendidik yang secara langsung berhadapan dengan murid dituntut melakukan hal-hal yang lebihterhadap mereka. Guru harus dapat mengembangkan prestasi dan potensi yang dimiliki oleh murid sehingga dapat dikembangkan seoptimal mungkin.

Tunanetra merupakan salah satu dari anak berkebutuhan khusus yang berhak memperoleh pendidikan. Secara harfiah tunanetra berasal dari dua kata yaitu tuna dan netra. Dalam Bahasa Jawa tuna (tuno) artinya rugi yang kemudian diidentikkan dengan rusak, hilang, terhambat, terganggu sedangkan netra (netro) yang berarti mata. Hadi (2005:36) mengartikan bahwa, ”... kata tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berarti adanya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata”. Kerugian atau kerusakan yang dimaksud adalah ketidakmampuan mempergunakan mata sebagai indra penglihatan dengan optimal.

Ketidakmampuan yang terjadi dapat menghambat di dalam proses memperoleh pendidikan. Dalam mengajar tunanetra menurut Lowenfeld (Sunanto, 2005:186) diperlukan tiga prinsip pengajaran yaitu: 1) pengalaman konkret, 2) penyatuan antar konsep, dan 3) belajar sambil melakukan. Apabila di dalam proses pembelajaran diterapkan prinsip tersebut, maka pembelajaran yang diberikan bagi murid tunanetra akan lebih mudah disampaikan oleh guru dan mudah pula dipahami oleh murid.

Tulisan yang lazim digunakan oleh penyandang tunanetra dalam menulis adalah tulisan braille, yaitu tulisan yang tersusun dengan kombinasi pola enam titik timbul yang membentuk garis horizontal dan garis vertikal. Tulisan braille adalah bagian dari kurikulum anak tunanetra. Menulis braille lebih dahulu diajarkan daripada membacanya. Di samping itu menulis braille juga dapat dilakukan melalui singkatan yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Sistem tulisan singkat braille diperkirakan dapat meningkatkan kecepatan menulis para penyandang tunanetra.

Sistem tulisan singkat braille bahasa Indonesia dikembangkan atas prakarsa Suharto pada tahun 1960-an dan dibukukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1972 dengan nama tusing. Menurut Tarsidi (1999) tulisan singkat atau dikenal dengan tusing adalah sistem ejaan braille dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari tanda-tanda tusing berupa satu petak braille atau lebih yang dimaksudkan untuk menyingkat penulisan kata-kata atau bagian kata, yang penyusunannya didasarkan pada kaedah-kaedah dasar EYD. Dalam bahasa Indonesia tulisan singkat braille dikenal dengan nama tusing sedangkan dalam bahasa Inggris tulisan singkat braille dikenal juga dengan istilah *contraction.*

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tanggal 06 s.d 08 Januari 2015 di SLB Negeri Somba Opu Kabupaten Gowa ditemukan permasalahan dalam menulis murid yaitu murid masih lambat menulis dan banyak melakukan kesalahan dalam menulis braille. Kesalahan yang dilakukan seperti banyaknya huruf yang kelebihan titik, huruf yang kekurangan titik, huruf yang tertinggal, dan huruf yang berlebih pada murid tunanetra yang sudah duduk di kelas dasar III.

Ketika anak disuruh menulis sebuah bacaan yang didiktekan, kemudian peneliti mengoreksi apa yang ditulis anak, ternyata banyak ditemukan kesalahan dari hasil tulisan anak. Anak juga sering menggunakan tulisan singkat pribadi sewaktu menulis, sehingga ketika anak diminta untuk membaca hasil dari tulisannya, anak terlihat kebingungan bahkan lupa dengan tanda braille yang telah ditulisnya. Di samping itu waktu yang dibutuhkan anak dalam menulis cukup lama. Yang peneliti jadikan patokan dalam menulis di sini adalah kata per lima menit (KPLM), yang mana menurut Laksana (2011) seseorang dikatakan cepat dalam menulis apa bila dapat menulis kata 200-250 dalam waktu lima menit, ukuran bagi orang awas.

Ketika didiktekan lagi sebuah bacaan yang sama kepada anak dalam waktu lima menit, ternyata murid tunanetra hanya mampu menulis 45 kata. Sewaktu peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas mengenai apa yang menyebabkan anak banyak melakukan kesalahan dalam menulis, guru kelas tersebut mengatakan bahwa anak berusaha untuk menulis atau mencatat materi pelajaran dalam waktu yang singkat, sehingga anak cendrung ceroboh dan terburu-buru sewaktu menulis. Peneliti menanyakan usaha yang telah dilakukan guru kelas untuk meningkatkan kecepatan anak dalam menulis braille, dikatakan dengan cara latihan menulis titik penuh sebanyak-banyaknya menggunakan riglet dan stilus pada kertas karton manila dan kertas hvs, yang dimaksud menulis titik penuh ini adalah menusuk ke enam titik yang ada pada kotak-kotak riglet menggunakan stilus. Namun usaha tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal.

Guru kelas tunanetra tersebut masih jarang mengajarkan tulisan singkat braille yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan secara intensif di sekolah, serta buku-buku pelajaran yang menggunakan tulisan singkat masih sedikit jumlahnya di sekolah tersebut. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kecepatan menulis anak dengan menggunakan tusing braille pada murid tunanetra kelas dasar III SLB Negeri Somba Opu Kabupaten Gowa.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pengunaan tulisan singkat braille dapat meningkatkan kecepatan menulis pada murid tunanetra kelas dasar III di SLB Negeri Somba Opu Kabupaten Gowa?

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peningkatan kecepatan menulis pada murid tunanetra kelas dasar III di SLB Negeri Somba Opu Kabupaten Gowa sebelum dan setelah menggunakan tulisan singkat braille.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
2. Bagi praktisi pendidikan, sebagai bahan informasi dalam pengembangan proses pembelajaran murid tunanetra, khususnya menyangkut pengembangan pembelajaran menulis dengan menggunakan tulisan singkat.
3. Bagi Peneliti, sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang membahas tentang penggunaan tulisan singkat braille dalam meningkatkan kecepatan menulis murid tunanetra.
4. Manfaat Praktis
5. Bagi kepala sekolah, sebagai salah satu bahan masukan untuk teknik pembelajaran tulisan singkat braille yang dapat diterapkan.
6. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun program dan melaksanakan pembelajaran menulis cepat.